

**FRAMING SKH KEDAULATAN RAKYAT TERHADAP VONIS SERDA  
UCOK TIGOR SIMBOLON DALAM PEMBERITAAN VONIS  
EKSEKUTOR KASUS CEBONGAN**  
*(Analisis Framing Vonis Serda Ucok Tigor Simbolon dalam Pemberitaan  
Mengenai Vonis Eksekutor Kasus Cebongan di Pengadilan Militer pada Surat  
Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Periode 5 September-6 September 2013)*

**Pantaleon/ Lukas S. Ispandriarno**

Program Studi Ilmu Komunikasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,  
Jl. Babarsari No 6 Yogyakarta 55281

**Abstrak**

Media memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Media menyediakan informasi berita, hiburan dan pengetahuan bagi masyarakat melalui konten-konten yang diterbitkan. Media adalah agen yang secara aktif menafsirkan realitas untuk disajikan kepada khalayak. (Eriyanto, 2002:26). Konstruksi realitas tersebut mengandung bias, sudut pandang, dan keberpihakan media berkaitan dengan topik pemberitaan yang mereka sajikan kepada pembaca.

Melalui analisis *framing*, proses pembingkai realitas yang dilakukan oleh media massa dapat dibongkar termasuk latar belakang, maksud, dan tujuan pembingkai tersebut.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana media dalam hal ini surat kabar lokal membingkai isu dan peristiwa yang terjadi di Yogyakarta. Khususnya bagaimana pembingkai Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat dalam pemberitaan vonis Serda Ucok Tigor Simbolon di pengadilan militer kasus Cebongan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam pengumpulan datanya dan analisis *framing*

sebagai metode analisis data. Dalam pengumpulan data terdapat tiga berita SKH Kedaulatan Rakyat yang menjadi objek dalam penelitian ini.

Proses penelitian dimulai dengan menganalisis tiga teks berita SKH Kedaulatan Rakyat dengan menggunakan perangkat *framing* Pan dan Kosicki. Hasil analisis teks mengungkap, SKH Kedaulatan Rakyat menolak atau tidak berpihak pada vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon di pengadilan militer kasus Cebongan. SKH Kedaulatan Rakyat membingkai bahwa vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon tidak sesuai dengan keadilan dan tidak berpihak pada masyarakat Yogyakarta.

Dalam ranah konteks dilakukan analisis menggunakan lima level faktor yang mempengaruhi isi media ala Reese dan Shoemaker. Penelitian pada level konteks diawali dengan wawancara dengan awak media SKH Kedaulatan Rakyat yakni Hudono (redaktur pelaksana), Sukro Riadi (wartawan) dan Wahyu Priyanti (wartawan). Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa SKH Kedaulatan Rakyat mendukung atau berpihak pada vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon. SKH Kedaulatan Rakyat menilai vonis tersebut sudah sesuai, adil dan harus dihormati. Vonis tersebut sudah melalui kajian dan pertimbangan hukum di pengadilan militer.

Temuan pada level teks dan konteks dalam penelitian ini ternyata berbeda. Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi perbedaan antara *framing* level teks dan konteks SKH Kedaulatan Rakyat dalam pemberitaan vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon.

*Keywords:* Surat Kabar lokal, pengadilan militer, vonis Cebongan, analisis

*framing*

## **1. Latar Belakang**

Kasus-kasus kekerasan dan pembunuhan merupakan salah satu jenis berita yang seringkali diberitakan oleh media massa. Apalagi jika sebuah kasus pembunuhan melibatkan orang-orang yang menjadi figur publik. Tentu saja itu merupakan sebuah berita yang sangat menarik untuk diberitakan.

Demikian pula dengan pemberitaan mengenai pengadilan militer kasus Cebongan. Pemberitaan ini bermula dari serangkaian aksi kriminal pembunuhan yang dimulai dari Hugo's Café pada tanggal 19 Maret 2013 dengan tewasnya salah satu anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Kandang Menjangan Kartasura yakni Sertu Heru Santoso. Polisi menahan 4 orang tersangka pembunuh yakni: Hendrik Benyamin Angel Sahetapi (Diki), Adrianus Candra Galaja (Dedi), Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu (Adi), dan Yohanes Juan Manbait (Juan). Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 dini hari, 11 orang anggota Kopassus Kandang Menjangan Kartasura menyerang lapas Cebongan dan menembak mati keempat tersangka kasus Hugo's Café (Kedaulatan Rakyat, Minggu 24 Maret 2013).

Rangkaian peristiwa berdarah ini menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Ada yang satu mendukung Kopassus dan ada yang mengecam aksi oknum anggota Kopassus tersebut. Kontroversi ini terus berlanjut hingga pengadilan militer dan penjatuhan vonis kepada para terdakwa Kopassus.

Persoalan ini kemudian menjadi menarik untuk diangkat karena peneliti memiliki beberapa pertimbangan antara lain: Serda Ucok Tigor Simbolon merupakan seorang anggota Komando Pasukan Khusus. Selain itu kasus ini menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Lalu, peneliti memiliki beberapa pertimbangan terkait pemilihan SKH Kedaulatan Rakyat dalam penelitian ini: SKH Kedaulatan Rakyat merupakan surat kabar harian terkemuka dan tertua di Yogyakarta (*Company Profile KR*, data dari Nielsen Media Index 2011). SKH Kedaulatan Rakyat menempati urutan pertama sebagai koran yang memiliki pembaca paling banyak di Yogyakarta dengan jumlah 475.000 orang (*Company Profile KR (Data dari Nielsen Media Index 2011)*).

Berdasarkan peringkat tersebut dapat disimpulkan bahwa SKH Kedaulatan Rakyat mendapatkan kepercayaan dan kesetiaan dari masyarakat Yogyakarta. Hal ini mengakibatkan opini publik masyarakat Yogyakarta sebagian besar dibentuk oleh pemberitaan SKH Kedaulatan Rakyat. Realitas yang ada dalam masyarakat Yogyakarta sejalan dengan realitas yang dikonstruksi oleh SKH Kedaulatan Rakyat.

Berita pengadilan militer khususnya berkaitan dengan vonis Serda Ucok Tigor Simbolon merupakan topik yang sangat menyita perhatian masyarakat Yogyakarta. Pembingkai berita SKH Kedaulatan Rakyat dalam pemberitaan vonis Serda Ucok Simbolon berpengaruh terhadap pembentukan opini publik masyarakat Yogyakarta dalam topik tersebut.

Dalam peristiwa pengadilan militer kasus Cebongan khususnya berkaitan dengan pemberitaan mengenai vonis Serda Ucok Tigor Simbolon, SKH Kedaulatan Rakyat menyajikan tiga berita. Sebagian besar berita mengenai vonis Serda Ucok Tigor Simbolon disajikan di halaman muka (*headline*). Peneliti tertarik untuk menggali kecenderungan pembingkai (*Frame*) SKH Kedaulatan Rakyat dalam pemberitaan topik tersebut.

Dalam pemberitaannya pula SKH Kedaulatan Rakyat menunjukkan *frame* yang digunakannya yaitu tidak mendukung vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon misalnya melalui pemilihan narasumber. SKH Kedaulatan Rakyat memilih narasumber yang berasal dari masyarakat atau tokoh yang mendukung dan membela Serda Ucok Tigor Simbolon dan kawan-kawan.

Peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dan bahan perbandingan. Pertama: Penelitian mengenai *framing* yang dibuat SKH Kedaulatan Rakyat juga diteliti oleh Tesa Oktiani Subekti (2012: 69). Dengan judul: Profiling George Aditjondro dalam Kasus Penghinaan Terhadap Keraton Yogyakarta. Dari penelitian ini, peneliti melihat konstruksi berita yang dilakukan oleh SKH Kedaulatan Rakyat, dengan *frame* berita mereka yang cenderung menyosokkan George Aditjondro ke arah yang negatif.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Devi Krismawati (2010: 79) dengan judul: Partisipasi Politik Etnis Tionghoa dalam Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 di Surat Kabar Harian Kompas Edisi Oktober 2003-September 2004 dan Oktober 2008-September 2009). Dalam penelitiannya, Devi Krismawati menemukan bahwa SKH Kompas menonjolkan Warga Tionghoa di Indonesia masih dianggap sebagai orang asing bukan sebagai warga negara Indonesia.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Visia Arina Puspita Rini (2010: 64) Dengan Judul Wacana Raja Perempuan Kraton Yogyakarta (Skrripsi Fisip Ilmu Komunikasi UAJY). Penelitian ini menggunakan metode analisis *framing* sekaligus menggunakan media yang sama yakni SKH Kedaulatan Rakyat. Dari penelitian ini peneliti melihat bahwa SKH Kedaulatan Rakyat cenderung menonjolkan pemberitaan yang kurang mendukung wacana raja perempuan

Kraton, dengan mengangkat narasumber yang lebih menginginkan raja Kraton adalah laki-laki.

**2. Tujuan Penelitian:** Mengetahui *frame* SKH Kedaulatan Rakyat dalam pemberitaan mengenai Vonis Serda Ucok Tigor Sombolon dalam pengadilan militer kasus Cebongan

**3. Frame SKH Kedaulatan Rakyat dalam pemberitaan vonis Serda Ucok Tigor Simbolon di Pengadilan Militer kasus Cebongan.**

#### **1. Frame level teks**

Dari hasil analisis terhadap tiga berita yang diterbitkan oleh SKH Kedaulatan Rakyat yakni: Tanggal 5 September 2013, dengan judul UCOK SIAP HADAPI VONIS HARI INI, Berharap Tak Ada Pemecatan. Pada berita tanggal ini, SKH Kedaulatan Rakyat memberikan penekanan bahwa tindakan Serda Ucok Tigor Simbolon dalam penyerangan ke lapas Cebongan yang menewaskan empat tahanan bukanlah merupakan pembunuhan berencana. Sehingga, Serda Ucok Tigor Simbolon yang menjadi salah satu eksekutor tidak layak mendapatkan hukuman berat termasuk pemecatan. SKH Kedaulatan Rakyat mengungkap *framennya* yang tidak mendukung vonis berat terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon. Hal tersebut dikuatkan dengan sejumlah bukti dan beberapa pernyataan narasumber yang dihadirkan SKH Kedaulatan Rakyat dalam teks berita.

Teks berita kedua yang diterbitkan oleh SKH Kedaulatan Rakyat adalah: Tanggal 6 September 2013, judul: VONIS 1 SAMPAI 11 TAHUN PELAKU KASUS CEBONGAN Dikalungi 'Plintheng' Pendukungnya. Dalam berita yang ditulis pada tanggal 6 September 2013 ini, SKH Kedaulatan Rakyat menekankan bahwa vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon dan kawan-kawan tidak adil

dan tidak memihak kepada masyarakat Yogyakarta. Melalui pernyataan-pernyataan narasumber, SKH Kedaulatan Rakyat mengecam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara dan pemecatan dari anggota TNI terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon. Melalui penekanan-penekanan itu, SKH Kedaulatan Rakyat menunjukkan *framenya* yang tidak mendukung vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon.

Teks berita ketiga yang diturunkan oleh SKH Kedaulatan Rakyat pada edisi 6 September 2013, berjudul: **INGIN TINGGAL DI YOGYA BERANTAS PREMAN; Suami Divonis, Istri Ucok Pingsan**. Pada berita tanggal 6 September 2013 ini, SKH Kedaulatan Rakyat menekankan bahwa Serda Ucok Tigor Simbolon adalah seorang pahlawan yang berjasa bagi masyarakat Yogyakarta. SKH Kedaulatan Rakyat menunjukkan niat Serda Ucok Tigor Simbolon yang akan tinggal di Yogyakarta setelah menjalani hukumannya. SKH Kedaulatan Rakyat juga mengedepankan duka istri dan anak Serda Ucok Tigor Simbolon yang mana mereka masih membutuhkan tanggung jawab dan kasih sayang Serda Ucok Tigor Simbolon. Semua bermuara pada kesimpulan *frame* SKH Kedaulatan Rakyat bahwa vonis 11 tahun dan pemecatan terhadap Serda Uok Tigor Simbolon tidak pantas karena jasa, tugas dan tanggung jawabnya masih dibutuhkan oleh masyarakat Yogyakarta dan keluarganya.

## **2. Frame level konteks**

Analisis level konteks peneliti lakukan dengan pihak-pihak terkait, khususnya pihak-pihak yang ada di SKH Kedaulatan Rakyat. Pada penelitian level konteks ini peneliti melakukan wawancara dengan Hudono selaku redaktur pelaksana di

SKH Kedaulatan Rakyat serta Sukro Ryadi (Roy) dan Wahyu Priyanti (Ayu) selaku wartawan yang menulis berita.

Isi dari media merupakan hasil dari konstruksi realitas. Reese dan Shoemaker (1996: 60) mengungkapkan lima faktor yang mempengaruhi konstruksi di media. Mulai dari faktor individual, rutinitas media, struktur organisasi, kekuatan ekstra media, dan ideologi.

Dari hasil wawancara dan analisis konteks peneliti melihat bahwa frame SKH Kedaulatan Rakyat adalah mendukung atau berpihak pada vonis Serda Ukok Tigor Simbolon. SKH Kedaulatan Rakyat melalui pernyataan awak media yang diwawancarai mengatakan bahwa vonis terhadap Serda Ukok Tigor Simbolon sudah sesuai atau sudah cocok karena melalui berbagai pertimbangan dan kajian hukum di pengadilan militer. Vonis tersebut harus dihormati dan itu merupakan harga yang harus dibayar oleh Serda Ukok Tigor Simbolon atas penyerangan lapas Cebongan.

Pada level individual, Hudono sebagai individu pekerja media SKH Kedaulatan Rakyat dengan jabatan redaktur pelaksana mendukung vonis terhadap Serda Ukok Tigor Simbolon. Akan tetapi dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu, yakni ketakutan terhadap dampak negatif destruktif dalam masyarakat dan menjaga keselamatan wartawan dan narasumber, Hudono berani melawan nuraninya dengan menurunkan teks berita yang tidak berpihak atau tidak menolak pada vonis Serda Ukok Tigor Simbolon dan kawan-kawan.

Sama seperti Hudono, Sukro Riadi menilai bahwa vonis terhadap Serda Ukok Tigor Simbolon sudah sesuai. Sukro Riadi mengatakan bahwa putusan vonis tersebut merupakan kewenangan mahkamah militer yang tentu saja sudah melalui



proses, pertimbangan dan kajian-kajian hukum. Dari pernyataan Sukro Riadi ini, peneliti melihat bahwa Sukro Riadi secara implisit mendukung vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon. Hal ini tentu saja bertentangan dengan pemberitaan mereka yang lebih menonjolkan ketidakberpihakkan terhadap vonis Serda Ucok Tigor Simbolon. Sebagai seorang individu yang mencari nafkah sebagai wartawan di SKH Kedaulatan Rakyat, Sukro Riadi rela melanggar hati nuraninya demi alasan ekonomi SKH Kedaulatan Rakyat sebagai institusi bisnis. Selain itu Sukro Riadi memiliki ketakutan dicap sebagai pihak yang pro premanisme.

Bagi Wahyu Priyanti dalam beberapa pernyataannya menekankan bahwa dirinya adalah seorang individu pekerja media yang tugasnya hanya meliput berita di lapangan dan menulisnya. Selebihnya entah berita yang ditulisnya dimuat atau tidak bergantung kepada redaktur. Kasus penyerangan ke lapas Cebongan di mata Wahyu Priyanti sendiri memiliki sisi positif. Sisi positif itu adalah turunnya angka kriminalitas di Yogyakarta. Wahyu Priyanti sempat menyebutkan identitas kedaerahan yakni Indonesia Timur. Walaupun ini merupakan hasil dari keterangan kepolisian tetapi menurut peneliti penyebutan identitas kedaerahan merupakan bentuk strotip wartawan yang berbau SARA.

Rutinitas internal sebuah media menentukan seperti apa media itu memberitakan suatu peristiwa. Sebagai mekanisme yang menjelaskan bagaimana berita diproduksi, rutinitas media karenanya mempengaruhi bagaimana wujud akhir sebuah berita (Sudibyo, 2001: 8). Pada bagian ini, ada rutinitas internal SKH Kedaulatan Rakyat yang menentukan frame SKH Kedaulatan Rakyat dalam vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon. Rutinitas itu adalah sidang redaksi dan rapat redaktur, penyeleksian berita, pemuatan gambar atau grafis berita, aspek

panjang pendek berita, penugasan wartawan, pembuatan lead, judul dan subjudul berita dan pemilihan narasumber. Dalam hal ini SKH Kedaulatan Rakyat menyatakan bahwa semua hal yang terkait pemberitaan diatur sesuai keputusan dalam sidang redaksi dan rapat redaktur. Dalam rutinitasnya itu, SKH Kedaulatan Rakyat harus mempertimbangkan nilai jual berita dan gambar yang dimuat, kemudian adanya pemotongan berita untuk menyisahkan ruang bagi iklan.

Pengelola media dan wartawan bukanlah orang tunggal yang ada dalam organisasi berita, mereka hanyalah bagian kecil dalam suatu organisasi media itu sendiri (Sudiby, 2001: 9). Pada level organisasi media ini SKH Kedaulatan Rakyat menunjukkan adanya relasi kekuasaan antara redaktur dan wartawan. Wartawan SKH Kedaulatan Rakyat seperti Sukro Riadi dan Wahyu Priyanti tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan layak tidaknya berita yang mereka tulis. Wahyu Priyanti mengatakan bahwa ada banyak narasumber yang telah mereka wawancarai terkait vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon tetapi tidak semuanya dimuat oleh redaktur.

Kekuatan ekstra media berhubungan dengan faktor lingkungan di luar media. Meskipun berada di luar organisasi, hal-hal di luar organisasi ini sedikit banyak dalam banyak kasus mempengaruhi pemberitaan media (Sudiby, 2001:10). Pada level ekstra media peneliti melihat bahwa pemberitaan SKH Kedaulatan Rakyat yang tidak berpihak pada vonis Serda Ucok Tigor Simbolon dipengaruhi oleh kekuatan masyarakat di Yogyakarta yang dominan mendukung Kopassus dan menolak vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon dan kawan-kawan sehingga menimbulkan ketakutan pada media SKH Kedaulatan Rakyat. Selain itu, adanya

kekuatan iklan memaksa SKH Kedaulatan Rakyat menerapkan asas piramida terbalik dengan melakukan pemotongan berita demi menyediakan *space* iklan.

Kemudian ada juga faktor ideologi yang mempengaruhi pemberitaan SKH Kedaulatan Rakyat. Ideologi adalah pikiran yang terorganisir, yakni nilai, orientasi dan kecenderungan yang saling melengkapi sehingga membentuk perspektif-perspektif ide yang diungkapkan melalui komunikasi dengan media teknologi dan komunikasi antarpribadi (Sobur, 2012: 64). Ideologi media memiliki peran tersendiri dalam mengkonstruksi realitas dalam masyarakat melalui pemberitaannya. Ideologi mengandung beragam makna dan sosok, gagasan dan citra, pendirian teoritis dan bentuk simbolis (Kellner, 2010: 81). SKH Kedaulatan Rakyat merupakan koran lokal yang sangat peduli dengan persoalan yang memiliki kaitan erat dengan daerah istimewa Yogyakarta. (*Company Profile SKH Kedaulatan Rakyat*). Menurut Hudono selaku Redaktur pelaksana SKH Kedaulatan Rakyat, kasus Cebongan yang berujung pada vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon dan kawan-kawan merupakan momentum bagi semua pihak untuk berbenah diri. Pernyataan Hudono ini merupakan bentuk kepeduliannya sekaligus sebagai representasi dari SKH Kedaulatan Rakyat yang peduli dengan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kapitalisme media menjadi salah satu faktor ideologis yang mempengaruhi pemberitaan media. Hudono dan Sukro Riadi sebagai awak media SKH Kedaulatan Rakyat juga mengakui bahwa berita kasus Cebongan hingga penjatuhan vonis memiliki nilai berita yang tinggi. Wahyu Priyanti juga mengatakan bahwa Serda Ucok Tigor Simbolon adalah sosok yang memiliki nilai berita yang tinggi. Dengan tingginya nilai berita dalam kasus tersebut SKH

Kedaulatan Rakyat cenderung berpihak pada kebutuhan pasar yang dominan untuk mencari keuntungan.

Hal ini membuktikan bahwa pemberitaan SKH Kedaulatan Rakyat yang tidak mendukung vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon didasari oleh kepentingan bisnis SKH Kedaulatan Rakyat. Dominasi masyarakat pro Kopassus di Yogyakarta merupakan potensi pasar yang bagus untuk meraup keuntungan. Dengan banyaknya jumlah pembaca SKH Kedaulatan Rakyat maka ratingnya akan naik, dengan demikian pemasukan dari penjualan koran dan iklan pun akan meningkat.

Di sini peneliti melihat bahwa *frame* SKH Kedaulatan Rakyat di level teks sama sekali berbeda dengan *frame* mereka pada level konteks. Pada level teks SKH Kedaulatan Rakyat menegaskan *frame* yang tidak berpihak atau menolak vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon dan kawan-kawan tetapi pada level konteks mereka berpandangan bahwa vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon sudah cukup, bahkan itu adalah harga yang harus dibayar oleh Serda Ucok Tigor Simbolon atas perbuatannya. Ada berbagai alasan yang bisa dilihat oleh peneliti berdasarkan pernyataan Hudono, yakni alasan keselamatan narasumber dan wartawan, alasan psikologis yakni ketakutan akan dampak destruktif dari masyarakat dan faktor pemasaran.

### 3. Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti setelah melakukan analisis pada level teks ialah SKH Kedaulatan Rakyat memiliki *frame* dan pandangan yang tidak mendukung vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon. Hal itu ditunjukkan oleh

SKH Kedaulatan Rakyat melalui caranya membingkai berita vonis Serda Ucok Tigor Simbolon. SKH Kedaulatan Rakyat secara gamblang membingkai bahwa Serda Ucok Tigor Simbolon tidak melakukan pembunuhan berencana yang pantas mendapatkan hukuman pidana yang berat. Pandangan SKH Kedaulatan Rakyat melalui narasumber yang hanya dari pihak pro Kopassus mengatakan bahwa vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon tidak adil. Pada level teks, SKH Kedaulatan Rakyat dengan tegas menunjukkan *frame* yang menolak vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon.

Pada level konteks didapati *frame* yang sama sekali berbeda dari level teks. Dengan menelaah konteks SKH Kedaulatan Rakyat berdasarkan lima level faktor yang dikemukakan Shoemaker dan Reese, peneliti melihat bahwa SKH Kedaulatan Rakyat berpihak atau mendukung vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon. Awak media yang menjadi representasi dari SKH Kedaulatan Rakyat dengan tegas mengemukakan bahwa vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon sudah sesuai karena didasarkan pada pertimbangan dan kajian hukum di pengadilan militer. Pandangan awak media SKH Kedaulatan Rakyat dengan tegas mengatakan bahwa vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon adalah keputusan hukum yang harus dihormati. Bahkan, pihak SKH Kedaulatan Rakyat berani menilai bahwa vonis tersebut merupakan harga yang harus dibayar Serda Ucok Tigor Simbolon selaku aparat negara yang melanggar hukum. SKH Kedaulatan Rakyat melalui pernyataan Hudono (redaktur Pelaksana) serta wartawan yang meliput berita yakni Sukro Riadi dan Wahyu Priyanti menyatakan dengan tegas bahwa pihaknya mendukung vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon. SKH Kedaulatan Rakyat memiliki *frame* level konteks yakni vonis terhadap Serda

Ucok Tigor Simbolon sudah sesuai dan vonis tersebut adalah harga yang harus dibayar oleh Serda Ucok Tigor Simbolon atas kesalahannya menyerang lapas Cebongan yang menewaskan empat orang tahanan.

Ada berbagai macam faktor penyebab perbedaan *frame* SKH Kedaulatan Rakyat pada level teks dan level konteks. Dengan menganalisis kelima faktor yang mempengaruhi isi media dari Shoemaker dan Reese, peneliti mendapati berbagai alasan yang menyebabkan berbedanya *frame* SKH Kedaulatan Rakyat di level teks dan level konteks. Ketakutan awak media SKH Kedaulatan Rakyat terhadap dampak negatif pemberitaan di masyarakat menjadi faktor individual yang menentukan pemberitaan. Rutinitas proses produksi berita di SKH Kedaulatan Rakyat sangat menentukan proses peliputan berita penentuan narasumber berita dan kelayakan berita vonis Serda Ucok Tigor Simbolon. Kemudian dari faktor struktur organisasi media, terdapat relasi kekuasaan antara wartawan dan redaktur SKH Kedaulatan Rakyat yang menentukan pemberitaan. Dominasi masyarakat pro Kopassus dan keberadaan iklan yang banyak di SKH Kedaulatan Rakyat menjadi faktor ekstra media yang memaksa awak media tersebut menunjukkan *frame* level teks yang bertolak belakang dengan *frame* level konteksnya terkait vonis terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon. Perhatian SKH Kedaulatan Rakyat yang besar terhadap persoalan menyangkut Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi faktor ideologi yang menentukan pemberitaan. SKH Kedaulatan Rakyat sebagai koran lokal yang peduli pada masalah Daerah Istimewa Yogyakarta melihat bahwa kasus Cebongan adalah momentum introspeksi dan perbaikan sistem pada masyarakat Yogyakarta, sehingga masalah sosial seperti premanisme bisa diberantas.

## Daftar Pustaka

- Company Profile* SKH Kedaulatan Rakyat. Tidak diterbitkan
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing, Konstruksi Ideologi dan politik Media*. Yogyakarta: LKIS
- Kellner, Douglas. 2010. *Budaya Media; Cultural Studies, Identitas dan Politik: Antara Modern dan Post Modern*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Shoemaker, Pamela J dan Stephen D. Reese. 1996. *Mediating The Messages: Theories of Influences on Mass Media Content*. Second edition. USA: Logman Publisher
- Sobur, Alex. 2012. *Analisis Teks Media; Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sudibyo, Agus. 2001. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKIS
- SKH Kedaulatan Rakyat, Edisi 6 September 2013
- SKH Kedaulatan Rakyat, Minggu 24 Maret 2013

## SKRIPSI

- Krismawati, Devi. 2010. *Partisipasi Politik Etnis Tionghoa dalam Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 di Surat Kabar Harian Kompas Edisi Oktober 2003-September 2004 dan Oktober 2008-September 2009*. Universitas Atma Jaya. Skripsi
- Rini, Visia Arina Puspita. *Wacana Raja Perempuan Kraton Yogyakarta*. Universitas Atma Jaya. Skripsi
- Subekti, Tesa Oktiani. 2012. *Profiling George Aditjondro dalam kasus penghinaan terhadap Keraton Yogyakarta*. Universitas Atma Jaya. Skripsi